Perdagangan Budak di Nusa Tenggara Sampai Pada Abad ke-19

Oleh :

Nuryahman, S.S.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT

A. Pendahuluan

Kepulauan Nusa Tenggara sebagai gugusan pulau di wilayah Indonesia timur, terletak di wilayah antara Indonesia bagian barat (Jawa, Sumatera, Kalimantan) dan kepulauan bagian timur Indonesia (Maluku dan Papua). Wilayah ini dapat dilihat sebagai penghubung antara wilayah bagian timur dan bagian barat Indonesia atau dengan negara-negara Asia bahkan Eropa. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda gugusan pulau ini disebut dengan *Lesser Sunda Island* atau *Kleine Soenda Eilanden* artinya Kepulauan Sunda Kecil yang terdiri dari Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Solor, Alor dan pulau-pulau kecil lain termasuk didalamnya adalah pulau Timor. Setelah Indonesia merdeka gugusan pulau tersebut menjadi Propinsi Sunda Ketjil dengan ibukota di Singaraja (Bali), wilayahnya meliputi kepulauan Sunda Kecil dikurangi pulau Timor bagian timur. Baru pada tahun 1958, Bali berdiri menjadi propinsi sendiri dan Nusa Tenggara menjadi dua

propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang RI No.64 Tahun 1958.[1]

Jadi wilayah Nusa Tenggara berpisah dengan Bali yang beribukota di Denpasar dan Nusa Tenggara masing-masing di Mataram dan Kupang. Nusa Tenggara Barat terdiri dari pulau Lombok, Sumbawa dan pulau kecil-kecil disekitarnya dibatasi oleh Selat Lombok di sebelah barat, Selat Sape di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara dan lautan Indonesia di bagian selatan. Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau Flores, Sumba, Timor bagian barat (Flobamor) dan pulau lainnya seperti Alor, Pantar, Solor, Sabu, Rote serta pulau-pulau kecil disekitarnya berbatasan di sebelah utara Laut Flores, selatan dengan Laut Timor dan Lautan Indonesia, sebelah timur dengan Negara Timor Leste dan Laut Banda serta sebelah selatan dengan Selat Sape.

B. Nusa Tenggara dan hubungan dengan dunia luar

Keterlibatan kawasan Nusa Tenggara dalam aktivitas perdagangan sudah lama baik itu lokal, regional maupun internasional dan berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Informasi awal mengenai perdagangan kayu cendana dari Timor banyak dilihat dalam sumber-sumber Cina, juga berita dari Tomi Pires dalam perjalanan di Asia menyebut Timor

[1] Djawatan Penerangan Propinsi Sunda Ketjil, ***Republik Indonesia : Sunda Ketjil***. (Djakarta : Kementerian Penerangan, Tanpa Tahun), hal. 22.

sebagai penghasil kayu cendana yang sangat dibutuhkan dalam perdagangan. Demikian juga mengenai aktivitas perdagangan di pulau Sumbawa, pada abad ke-16 menurut laporan Tomi Pires produk-produk perdagangan dari Bima dan Sumbawa antara lain : kuda, budak, daging, kayu sapan dan tekstil. Dikatakan pula kota-kota pelabuhan di pulau Sumbawa seperti Sumbawa, Bima dan Kore di pantai utara dan Sape di pantai timur sudah berperan dalam lalu lintas perdagangan. Bahkan pelabuhan Bima boleh dikatakan sudah sederajat dengan Ternate, Makasar, Demak, Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Aceh, Malaka. Bima sudah banyak dikunjungi pedagang dari : Jawa, Madura, Sumatera, Bali, Borneo, Selebes, Selayar, Buton, Manggarai dan Maluku bahkan Malaka dan akhirnya bangsa Eropa. Bandar Bima pada waktu kejayaanb Kesultanan Bima telah mempunyai Hukum Bicara Undang-Undang Bandar Bima.[2]

Demikian juga wilayah Nusa Tenggara bagian Timur yang sekarang telah menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di berbagai wilayah tersebut telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dan secara politis menjadi perebutan pengaruh dari berbagai kekuasaan bahkan pengaruh dari bangsa Eropa. Di Pulau Flores bagian barat menjadi pengaruh dari Makasar yaitu wilayah di sekitar pelabuhan Reo. Sesudah perjanjian Bongaya masuk ke wilayah pengaruh kekuasaan Bima. Sedangkan di bagian Timur pulau Flores, Alor, Pantar, pengaruh kekuasaan Ternate berada disana. Namun berbagai

[2] Siti Maryam R. Salahudin, ***Bandar Bima***. (Jakarta : Depdikbud, 1992)

pengaruh tersebut di atas tidak banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Nusa Tenggara Timur, Raja-raja disana tetap menjalankan kekuasaan dengan penuh.

Portugis yang pada tahun 1511 telah merebut Malaka, mengirimkan misi-misinya ke daerah Nusa Tenggara Timur, terutama ke pulau Flores dan pulau Timor dan untuk memperkokoh kedudukannya di tempat-tempat strategis didirikan benteng-benteng untuk menghadapi kekuasaan Islam. Tahun 1566 benteng Lohayong di pulau Solor didirikan, kemudian tahun 1596 benteng di pulau Ende dan tahun 1640 benteng di Kupang. Namun usaha Portugis menyebarkan kekuasaannya di Nusa Tenggara Timur diikuti pula oleh Belanda. Tahun 1913 Belanda berhasil merebut benteng Portugis di Solor. Antara Portugis dan Belanda terjadi persaingan dan masing-masing berusaha mengadakan persekutuan dengan raja-raja setempat. Dengan kekuatan dan taktiknya Belanda berhasil menggeser pengaruh Portugis di pulau Flores dan Timor bagian Barat.

Pada tanggal 6 Juni 1735 Belanda dengan berbagai cara berhasil mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Timor, Solor dan Sumba yang akhirnya memberi monopoli dagang pada Belanda dan mengakui kedaulatan Belanda. Usaha tersebut dilanjutkan terus sehingga dari tahun 1900 sampai 1927 telah terjadi 73 buah perjanjian atau kontrak *korte verklaring* dengan raja-raja kecil. Untuk mengatasi persaingan antara Portugis dengan Belanda dan agar masing-masing leluasa menyebarkan pengaruh dan melakukan

monopoli perdagangan, maka diadakan Perjanjian Lisabon pada tanggal 10 Juni 1893 yang ditandatangani 1 Oktober 1904 dengan menetapkan pembagian wilayah yakni Portugis menguasai daerah Timor bagian timur dan Belanda menguasai Timor bagian barat.

Jadi jauh sebelum abad ke-19 kelompok penduduk di Nusa Tenggara sesungguhnya telah membina hubungan dengan kekuatan-kekuatan diluarnya baik dalam bidang politik maupun perdagangan. Hal itu nampak pada kerajaan-kerajaan di Lombok (hubungan dengan Bali), Sumbawa-Bima dengan Gowa (Makasar) dan lingkungan Timor (khususnya Solor) pernah terkait dengan Maluku (Ternate) walaupun akhirnya di wilayah ini sangat terkait dengan kekuatan Eropa terutama Portugis dan Belanda.[3] Dapat dikatakan bahwa Nusa Tenggara merupakan tempat persinggahan penting dalam rangka perdagangan antara Malaka atau Indonesia bagian barat dengan Maluku atau Indonesia bagian timur, terutama Solor dan Bima di bagian utara dan Kupang, Atapupu di bagian selatan.

C. Budak sebagai Komoditas perdagangan di Nusa Tenggara

Komoditas penting perdagangan di Nusa Tenggara antara lain : kayu cendana, kuda, hasil hutan dan budak. Kawasan Nusa Tenggara Timur telah lama dikenal di dunia luar sebagai daerah produksi kayu cendana, disamping

[3] I Gde Parimartha, ***Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915.*** (Jakarta : Djambatan, 2002), hal. 103.

itu kuda dari Sumba juga merupakan barang yang sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan pada waktu itu. Di pulau Sumbawa juga terkenal komoditas perdagangan kayu sapan, pada tahun 1831 Bima melalui pelabuhannya mengirimkan kayu sapan sebanyak 2.187,5 pikul, tahun 1832 sebanyak 3.172,5 pikul dan pada tahun 1882 sebanyak 3.850 pikul.[4]

Salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan di Nusa Tenggara sebelum abad ke-20 adalah Budak. Budak pada zamannya telah merupakan suatu barang kekayaan yang penting artinya karena berguna dapat membantu tuannya seperti bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan. Mereka dapat dijual, ditukar atau diperdagangkan seperti barang dagangan lain. Di Nusa Tenggara (khususnya Lombok) orang seperti ini disebut sebagai *Jalma adol-adolan* (orang yang diperjualbelikan). Perdagangan budak ramai dilakukan bahkan melampui tahun 1830-an di Nusa Tenggara yang tentu berkaitan dengan sistem masyarakatnya. Sistem sosial masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan tajam antara kelompok penguasa dan penduduk biasa, kurang adanya ketentuan hukum yang dapat mengatur keadilan, kejadian perang antar kerajaan memberikan tempat bagi munculnya perbudakan dan perdagangan budak. Istilah-istilah seperti : panjak di Bali-Lombok, tau ulin di Sumbawa, ata di Sumba-Timor, ata hao di Ende (Flores) menunjukan adanya kelompok yang dipandang sebagai orang yang bisa dijadikan budak. Dapat dipahami bahwa karena perbedaan pada

[4] Siti Maryam R. Salahudin, …… hal., 54.

sikap masyarakat dan kebudayaannya, nampak juga variasi bagaimana orang menjadi budak dan dapat diperdagangkan di Nusa Tenggara. Datangnya bangsa Eropa pada awalnya ikut menunjang berkembangnya perdagangan budak ini. Dalam hal ini perdagangan budak dapat berhubungan dengan keperluan tenaga perusahaan-perusahaan orang Eropa, juga sebagai tenaga pencari kerang mutiara, teripang di lingkungan raja pribumi. Di Nusa Tenggara munculnya seseorang menjadi budak dapat disebabkan karena berbagai alasan yang mungkin memberikan ciri unik atas perbudakan yang ada di kepulauan Indonesia pada waktu itu. Ada orang dirampok dan dijual sebagai budak, atau karena kesalahan dihukum oleh raja, karena hutang yang tidak dapat dibayar.

Aktivitas perdagangan budak sudah nampak sebelum abad ke-17, sebelum kompeni secara formal menguasai Makasar tahun 1667. Sesudah ada perdagangan terbuka, maka jual beli budak mulai aktif, Tahun 1436 Hsing ch'a Sheng sudah mencatat adanya 12 pelabuhan di Timor dengan berbagai komoditas perdagangan termasuk budak namun belum ada catatan tentang berapa hamba sahaya yang diperdagangkan. Baru pada tahun 1618, sumber Cina yang lain Tung His Yang ke'an mencatat rombongan raja bersama istri, anak-anaknya, gundik-gundik dan beberapa dagangan hamba sahaya.[5] Pada masa Belanda setelah secara formal menguasai Makasar

[5] ADM. Parera, ***Sejarah Pemerintahan Raja-Raja di Timor : Suatu Kajian Peta Politik Pembentukan Kerajaan-Kerajaan di Timor sebelum Kemerdekaan RI. (***Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 81.

tahun 1667 sudah membuka memerlukan tenaga manusia untuk bekerja di galangan kapal, pertukangan, rumah-rumah pegawai dan mengisi kekurangan sebagai prajurit.

Di Batavia telah tercipta bagian kota yang bernama Kampung Manggarai (disamping : kampung Bali, kampung Makasar, kampung Melayu), pemukiman bekas hamba sahaya asal Manggarai, Ndu'a (Ngada) kuo, Pawo (Ende), Sumba pada masa perdagangan budak (hamba sahaya0 sejak tahun 1660-an. Dagristel Kastel Batavia pada bulan Oktober 1664 mencatat tentang tibanya perahu layar dari "Mangary" (Manggarai) berawak 8 orang dengan muatan 50 pikul kulit kayu manis hutan. Bulan Oktober 1668 berita datang perahu layar dari Manggarai dengan 15 awak berisi muatan lilin, madu, beras, kayu manis dan dagangan 17 orang hamba sahaya. Pada tahun 1670, tercatat pula tiba tiga perahu layar dari Manggarai disamping barang dagangan biasa, termuat juga "20 stucx" (20 pices) hamba laki-perempuan. Berarti sejak tahun 1668, 1670 Kompeni Belanda telah menjadi pembeli dan pemesan perdagangan budak lewat makelar-makelar pedagang hamba sahaya, termasuk hamba dari Manggarai dan memperoleh tampungan di bagian timur Batavia yang sekarang menjadi Kampung Manggarai.[6] Hamba sahaya yang dimaksud dalam hal ini adalah budak yang diperdagangkan. Hamba sahaya merupakan kelas masyarakat yang tidak mempunyai suatu hak, bahkan hak hidup berada sepenuhnya dalam tangan tuannya. Mereka

[6] Dami N. Toda, ***Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi***. (Ende : Nusa Indah, 1999), hal 107.

adalah milik pribadi bukan milik suku, pada mulanya hamba sahaya itu adalah tawanan perang, atau yang diculik berdasarkan keadaan permusuhan antar suku.[7]

Tahun 1769 Sultan Bima, Abdul Kadim mengunjungi wilayah Manggarai setelah kembali pulang juga membawa hadiah-hadiah budak dari tawanan perang yang terjadi di daerah Pota. Sultan Abdul Kadim juga meminta upeti hamba dari Manggarai atas desakan Kompeni Belanda, dasar hukum upeti hamba atau upeti budak ini terkenal dengan sebutan "teki mendi" (upeti berupa bayaran budak). Neraca komoditas upeti budak atau pengeksporan hamba Manggarai menurut catatan mencapai 2.000 budak pertahun termasuk jumlah 300 hinga 400-an orang budak atas nama upeti.[8] Budak-budak tersebut kemudian diperdagangkan lewat pelabuhan Bima.

Perdagangan budak dan perampokan manusia (untuk dijual sebagai hamba sahaya) juga terjadi di pulau Sumba yang dilakukan oleh orang-orang Ende dan Ambarai (Manggarai). Suatu bukti sejarah betapa pulau Sumbapun masa itu menjadi sasaran dan obyek perampokan manusia untuk komoditi perdagangan budak oleh makelar dan pedagang budak dari Ende dan Manggarai untuk konsumen Kompeni Belanda.[9] Pengiriman budak bagi kompeni ke Batavia pada masa itu lewat penawaran perdagangan biasa di

---

[7] ADM. Parera, …….hal 80.
[8] Dami N. Toda,…… hal., 273.
[9] O.H. Kapita, ***Sumba Dalam Jangkauan Jaman.*** (Waingapu : Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, 1976), hal. 18.

Bima atau jalur resmi berupa rampasan perang yang ditagih lewat perjanjian dari Makasar.

Tidak jelas berapa sesungguhnya budak yang dikeluarkan dari kawasan Nusa Tenggara. Karena perdagangan budak tidak selalu dapat dikontrol maupun dicatat oleh kekuasaan Eropa yang biasanya melakukan pencatatan barang impor-ekspor. Tome Pires yang jelas menyebutkan, bahwa pulau-pulau di sebelah timur Jawa ini banyak menghasilkan bahan makanan, pakaian, kuda dan budak (baik laki atau perempuan), barang-barang ini banyak dijual ke Jawa. Pada awal abad ke-18 tidak hanya orang-orang Portugis, tetapi juga Belanda membeli atau memborong budak-budak dari Timor. Hal ini dapat dilihat sejarah kota Atapupu yang sejak lama dikenal menjadi pusat perdagangan budak. Atapupu (bahasa Tetun) kemudian berubah menjadi Atambua, Atan atau Ata : hamba sahaya atau budak.[10] Berbagai sumber yang terdapat di Arsip Nasional antara lain : 1. *Duplicaat Brieven en Bijlagen van Timor in 1809*, berisi Daftar nama budak yang dibawa yang dibawa oleh Kapal layar Padukawang de Bakoel dari Surabaya pada tanggal 18 September 1809. 2. *Algemen Verslag der Residentie Timor over het Jaar 1843, 1852, 1845* yang berisi laporan tetap jumlah budak yang ada di Kupang. Serta sumber-sumber lainnya banyak memberikan keterangan mengenai kedatangan kapal-kapal layar dari Nusa Tenggara yang mengangkut budak dan diturunkan di Batavia.

[10] ADM. Parera, ... , hal. 83.

Pelayan Belanda di Batavia sebagian besar terdiri dari budak-budak dari Timor, P.J. Veth dalam tulisannya *Het eilend Timor* menyatakan bahwa residen Van Erste di Kupang tahun 1789 memiliki ribuan budak. Tahun 1717 residen Van der Burg melaporkan keadaan perang Penfui tahun 1747 dan sebagai lampiran dikirim juga 70 orang budak yaitu 35 orang dibeli dari orang Cina the Thinko dan 35 lainnya dibeli dari orang Cina Oijn Pinko yang jumlahnya sesuai dengan harga faktur yaitu f 433,20, harga rata-rata adalah f 62 dan ini sudah cukup mahal. Pada masa residen Ter Horbrugger 1761 ada kebiasaan di Kupang yaitu kalau seorang petugas hendak pergi ke Batavia untuk suatu urusan, maka terlebih dahulu ia masuk ke kampung-kampung atau pulau-pulau kecil di sekitar Kupang dengan membawa anjing untuk memburu dan menangkap manusia. Orang-orang ditangkap itu dibawa ke Batavia sebagai hadiah atasan dan komandan serta kerabat dan lainnya dijual untuk mendapatkan uang.[11]

D. Merosotnya Perdagangan Budak

Pada awal abad ke-19 perdagangan budak tetap berlangsung di Nusa Tenggara, meskipun kekuasaan Eropa (terutama Inggris , kemudian Belanda) berusaha menghentikan hal tersebut. Tahun 1818 pemerintah

[11] ADM Parera,……. hal .82

Belanda mulai melarang perdagangan budak di seluruh wilayah Hindia-Belanda, tetapi baru mulai efektif membatasinya tahun 1859. Meskipun demikian di Sumba selain kayu cendana, juga masih tetap ramai dengan perdagangan budak sepanjang abad ke-19. Orang-orang Cina juga aktif terlibat dalam perdagangan budak selain orang Makasar, Bugis, Ende. Tahun 1820-an di Kupang tinggal orang-orang Cina yang sibuk dengan perdagangan budak. Selain Cina di Kupang juga tinggal para pedagang Eropa, jadi bukan tidak mungkin orang Eropa juga masih terlibat dalam perdagangan budak ini. Budak-budak ini diperdagangkan melalui jalur perdagangan budak yang sudah meluas tidak hanya di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Bima tetapi sampai ke Mauritius, Bourbon dan Singapura.

Meskipun ada pelarangan perdagangan budak tetap berlangsung sepanjang abad ke-19 dan merupakan aktivitas ekonomi penting dan kemudian berkurang sejak hal itu dilarang secara intensif oleh kekuasaan Eropa. Dari catatan tahun 1814 Batavia memiliki budak sebanyak 18.972 orang, sebagian besar mereka berasal dari Nusa Tenggara yang didatangkan melalui Bima, Bali dan Makasar. Pada tahun 1850 muncul berita masih dijualnya sekitar 70-an budak dari Kupang dan Rote yang dibawa ke Jawa oleh pedagang dari Surabaya.[12] Kolonial Verslag tahun 1881 melaporkan masih adanya perdagangan budak di Timor, dan ternyata pada jaman H.J. Grijen (1904), Steimetz (1916 dan Th. Overken (1927) masih ada kelas

[12] I Gde Parimartha, ……... hal., 270.

hamba sahaya dalam masyarakat di sebagian wilayah Nusa Tenggara.[13] Demikian Nusa Tenggara sampai pada periode ini tetap menjadi pusat perdagangan budak. Ketika ada pelarangan yang makin keras maka tidak lagi pencari budak dari Mauritius dan Bourbon, tetapi orang-orang dari lingkungan dalam yang dekat dengan masyarakat Nusa Tenggara. Mereka yang juga punya peranan penting dalam kegiatan ini adalah orang-orang Bugis, Makasar, Ende, Bima dan orang-orang di pantai utara Flores ditambah lagi dengan orang Cina.

Kepentingan politik yang mendasari demi lancarnya ekspansi kekuasaan dan adanya keamanan laut, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menghapuskan bentuk perbudakan ini, terutama yang berhubungan dengan perompakan di laut. Selain mencoba dengan pendekatan para raja atau kepala-kepala penduduk (seperti yang terjadi di Ende) pemerintah Belanda melakukan pula tekanan dengan kekuatan senjata atau militer. Pada tahun 1867 pemerintah Belanda mulai menempatkan seorang Posthouder di Ende dengan tugas menjaga keamanan rakyat dan juga mengawasi agar tidak diadakan perdagangan budak dari Flores ke Sumba. Petugas tersebut dilengkapi dengan perahu motor guna mengadakan patroli lalu lintas perairan antara Ende-Sumba. Pada tahun 1879 orang-orang Ende tidak setuju dengan adanya pelarangan tersebut sehingga terjadi banyak perlawanan.

---

[13] ADM. Parera. ……..,hal. ,82.

Pada tahun 1807 Belanda mulai mengadakan penangkapan terhadap para pedagang budak dan satu tahun kemudian 1808 para pedagang budak yang ditangkap diwajibkan membayar denda, para penduduk yang diculik dan akan dijadikan budak dilepaskan serta dikembalikan ke daerah asalnya. Raja Ende ternyata juga salah seorang pedagang budak yang besar, sehingga diharuskan membayar denda kepada Belanda, semenjak itu perdagangan budak di Ende menjadi berkurang.[14] Para penguasa lokal atau raja memang banyak yang terlibat dalam perdagangan budak karena memang mendapatkan keuntungan yang besar dalam usaha ini. Begitu juga para penguasa di Bali, Belanda menggunakan serdadu yang terdiri dari budak dalam perang Puputan Badung, budak tersebut dijual oleh para raja di Bali ke Batavia, sehingga merasa ada kesempatan untuk balas dendam dengan orang yang telah menjual mereka.[15] Demikian di Nusa Tenggara kegiatan perbudakan semakin ditekan oleh pemerintah Belanda. Dengan Ende Kontrak (1839) dan diperbaharui tahun 1861, demikian juga dilakukan dengan raja-raja di Sumba. Raja Lombok juga mengeluarkan larangan perdagangan budak tahun 1859 (tahun saka 1773) dan diperbaharui tahun 1886. Suultan Muhammad Sah (1817) juga menerima surat dari Bumi Paraso Bolo (Bima) (1827) dari Ujung Pandang yang berisi bahwa perdagangan hamba tidak dibolehkan lagi oleh Gubernemen.

---

[14] FX. Soenaryo, dkk., Sejarah Kota Ende.(Denpasar : Pustaka Larasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, 2006), hal. 159-160.
[15] Henk Schulte Nordhot, dkk., Seabad Puputan Badung. (Denapasar : Pustaka Larasan 2006).

Demikianlah keadaan perdagangan budak di Nusa Tenggara, setelah merosotnya perdagangan budak akibat pelarangan oleh penguasa maka kemudian komoditas yang ramai di Nusa Tenggara beralih ke kuda dan kayu cendana, beras dari Lombok. Namun berbagai sumber juga mengatakan, sekalipun perdagangan budak telah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, perdagangan budak juga masih marak dilakukan secara terselubung dan dari beberapa pejabat pemerintah juga banyak yang terlibat. Dari semua uraian diatas bahwa budak-budak di Nusa Tenggara terutama berasal dari Sumba, Ngada, Manggarai dan Timor. Di Era sekarang perdagangan atau pengiriman budak dari Nusa Tenggara memang telah tiada, namun pengiriman manusia dari daerah tersebut masih berlangsung terutama dari Nusa Tenggara Barat (Lombok, Sumbawa, Bima) dan Nusa Tenggara Timur, mereka tidak lagi menjadi budak namun sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke Malaysia, Korea, Jepang dan Timur Tengah. Kadang-kadang nasib mereka juga lebih buruk daripada budak di era perdagangan budak, apalagi beberap TKI yang ilegal atau lewat makelar, oknum-oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Kasus Nirmala Bonet dari Kupang Nusa Tenggara Timur yang disiksa oleh majikannya di Malaysia merupakan salah satu contoh betapa nasib mereka lebih buruk daripada budak di era perdagangan budak sebelumnya. Praktek pengiriman TKI melalui percaloan mempunyai pola yang mirip dengan era perdagangan manusia pada masa lalu.

Daftar Pustaka

a. Arsip

- *Bijlagen Gehoorende tot de Brieven ontvangen van Timor in 1808*
- *Brieven en Bijlagen Duplicaat van Timor in 1809*

  Daftar nama-nama budak yang dibawa oleh Padukawang de Bakoel ke Surabaya, tanggal 18 September 1809.
- *Register de Handelangaen Besluiten de Waarnemend Residen van Timor den maander 1834,1845,1846,1847.*
- *Algemen Verslag der Residentie Timor over het jaar 1843,1845,1852.*

  Laporan mengenai jumlah pendatang dan budak di kota Kupang
- *Kont Verslag Omrent de stand van zaken het Personeel in Residentie Timor gederande de maanden, January-December 1876*
- *Contract Boek, afschrif.*

  Perjanjian yang dilakukan oleh Raja-Raja Timor dengan VOC mengenai kayu cendana, budak, dengan bangsa lain yaitu : Inggris, Portugis, Perancis, dan Makasar.

b. Buku

Dami N. Toda, 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende : Nusa Indah

Depdikbud, 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Djawatan Penerangan Propinsi Sunda Ketjil, tanpa tahun. *Republik Indonesia : Sunda Ketjil* . Djakarta : Kementerian Penerangan.

Hilir Ismail. " *Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*". Naskah belum diterbitkan tahun 1988.

Henk Schulte Nordhot,dkk., 2006. *Satu Abad Puputan Badung*. Denpasar : Pustaka Larasan

I Gde Parimartha, 2002. *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915.* Jakarta : Djambatan.

Kapita, O.E.H, 1976. *Sumba Dalam Jangkauan Jaman*. Panitia Penerbitan Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba - Waingapu.

Koehuan, dkk., 1982*. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Nusa Tenggara Timur*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Kana, CH. "Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor". *Skripsi* Jurusan Sejarah, Fak. Keguruan, Undana Kupang 1969.

Kers,V.V., 1948. *An Anthropological Survey of The Eastern Litle Sunda Islands (Soemba).* Amsterdam : Indich Instituut.

Louis Gottschalk, 1986. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Lalu Manca, 1984. *Sumbawa Pada Masa Lalu. Suatu Tinjauan Sejarah.* Surabaya : Rinta

Parera, A.D.M., 1971. *Sejarah Politik Pemerintahan Asli di Timor.* Kupang : Pereana.

Reid, A. (ed)., 1983. *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia.* New York : St. Martin's Press.

Siti Maryam R. Salahudin, 1992. *Bandar Bima*. Jakarta : Depdikbud

Soenaryo. FX., dkk., 2006. *Sejarah Kota Ende*. Denpasar : Pustaka Larasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ende.

Zoollinger, H., 1949. *Reis Over de Eilanen Bali en Lombok.* (S:I: Sn).

------------, 1947. *Verslag van eene Reis naar Bima en Soembawa.* (S:I:Sn).